PENCABUTAN IJIN HAK ATAS PENGELOLAAN TANAH YANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

SKRIPSI

Oleh :

JOHANES PRASETYO
NBI : 1311600027

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020

Scanned by CamScanner

PENCABUTAN IJIN HAK ATAS PENGELOLAAN TANAH YANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

JOHANES PRASETYO
NBI : 1311600027

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020

Scanned by CamScanner

PENCABUTAN IJIN HAK ATAS PENGELOLAAN TANAH YANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

JOHANES PRASETYO
NBI : 1311600027

Dosen Pembimbing :

Abraham Ferry Rosando, S.H.,M.H.
NPP/NIDN : 20310160711

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020

Scanned by CamScanner

PENCABUTAN IJIN HAK ATAS PENGELOLAAN TANAH YANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Oleh :

JOHANES PRASETYO
NBI : 1311600027

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 11 Januari 2019
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 019/K/FH/2020
Tanggal : 8 Januari 2020

TIM PENGUJI :

Ketua : Sad Praptanto Wibowo, SH., MH. .....
NPP : 20310870119

Sekertaris : Kristoforus Laga Kleden, SH., MH. .....
NPP : 20310900210

Anggota : Abraham Ferry Rosando, SH., MH. .....
NPP : 20310160711

Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065

Scanned by CamScanner

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Johanes Prasetyo
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

PENCABUTAN IJIN HAK ATAS PENGELOLAAN TANAH YANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Bahwa benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 Januari 2020
Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
BA286AFF627782961
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Johanes Prasetyo

Scanned by CamScanner

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Johanes Prasetyo
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

PENCABUTAN IJIN HAK ATAS PENGELOLAAN TANAH YANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Bahwa benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 Januari 2020
Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
97390AFF627782957
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Johanes Prasetyo

Scanned by CamScanner

UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. Semolowaru 45 Surabaya
Tlp. 031 593 1800 (ex.311)
Email : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Johanes Prasetyo
NBI	: 1311600027
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Jenis Karya	: Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ***Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)***, atas karya saya yang berjudul :

PENCABUTAN IJIN HAK ATAS PENGELOLAAN TANAH YANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Dengan ***Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty- Free Right)***, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di Pada	: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Tanggal	: 30 Januari 2020

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
F8D79AFF627782966
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(Johanes Prasetyo)

Johanes Prasetyo

Scanned by CamScanner

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan atas Berkah, Rahamat yang senantiasa dilimpahakan kepada saya, sehingga bisa menyelasaikan skripsi dengan judul "PENCABUTAN IJIN HAK ATAS PENGELOLAAN TANAH YANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM" sebagai syarat untuk menyelesaiakan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbgai pihak baik secara moral maupu spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Abraham Ferry Rosando, S.H.,M.H Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
2. Widhi Cahyo Nugroho, SH.,MH selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan dan seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya.
3. Kedua Orang Tua dan keluarga saya yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya angkatan tahun 2016 yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Surabaya, 30 Januari 2020

Johanes Prasetyo

ABSTRAK

Tanah memiliki peranan penting bagi manusia karena setiap kegiatan yang dikerjakan manusia berhubungan dengan tanah.Tanah digunakan pemerintah untuk kepentingan umum oleh karena itu pemerintah memiliki 2 masalah yaitu digunakan untuk kepentingan umum dan yang tidak di gunakan untuk kepentingan umum.Berdasarkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tanah yang digunakan untuk kepentingan umum pemerintah berhak untuk mengelolanya.Sekarang banyak sekali pembangunan yang mengesampingkan kepentingkan umum yang berdiri di atas tanah milik negara dan mengambil hak-hak masyarakat. Pengambilan tanah yang tidak digunakan untuk kepentingan umum diberikan ganti kerugian mengacu pada UUPA pasal 18 dan UU No. 2 tahun 2012.

Permasalahan yang ada di skripsi ini adalah apakah pemerintah berwenang mencabut ijin hak atas pengelolaan tanah yang tidak digunakan untuk kepentingan umum dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak guna bangunan di atas ijin pengelolaan tanah.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah normatif. Menggunakan data primer dan sekunder yang sudah dikumpulkan yang kemudian dianalisa dengan konsep pencabutan ijin hak atas pengelolaan tanah yang tidak digunakan untuk kepentingan umum.

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah berwenang mencabutan ijin hak atas pengelolaan tanah yang tidak digunakan untuk kepentingan umum karena telah sesuai dengan kewenangan pemerintah terhadap hak pengelolaannya.

Kata kunci: Pencabutan, Hak Pengelolaan, Tidak untuk Kepentingan Umum

ABSTRACT

Land has an important role for humans because every activity carried out by humans is related to land. The land is used by the government for public purposes, therefore the government has 2 problems, which are used for public purposes and not used for public purposes. Based on Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution, the government has the right to manage the land which is used for public purposes. Ringht now, a lot of development that overrides the public interest that stands on state-owned land and takes community rights. Land acquisition that is not used for public purposes is compensated according to UUPA article 18 and UU no. 2 of 2012.

The problem in this thesis is whether the government has the authority to revoke permits on land management that are not used in the public interest and how the legal protection of owners of the building rights over land management permission.

The research method used in this thesis is normative. Using primary and secondary data that has been collected and then analyzed with the concept of revocation of permits for land management that are not used in the public interest.

It can be concluded that the government has the authority to revoke permits on land management rights that are not used for public purposes because it is in accordance with the government's authority over management rights

Keywords: Revocation, Management Right, Not used for Public Interest

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....
HALAMAN SAMPUL DALAM.....
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI..... iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA..... v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI PERPUS..... vi
KATA PENGANTAR..... vii
ABSTRAK viii
ABSTRACT ix
DAFTAR ISI..... x
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah..... 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Manfaat Penulisan 6
1.5 Metode Penulisan … 6
1.5.1 Jenis Penelitian..... 6
1.5.2 Metode Pendekatan 7
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum 8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 8
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum 9
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konsep Pengadaan Tanah 11
2.2 Konsep Perijinan 14
2.3 Konsep Perlindungan Hukum 18
2.4 Konsep Hak Kepemilikan Atas Tanah 20
2.5 Konsep Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum..... 23
2.6 Konsep Hak Pengelolaan Lahan 25
BAB III PEMBAHASAN
3.1 Pencabutan Hak Atas Tanah 29
3.2 Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum..... 36
3.3 Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi..... 47

Bab IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan……. 57

4.2 Saran 58
Daftar Bacaan